

SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP)

A. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah	: Sistem Pemerintahan Nasional dan Lokal
Dosen Pembina	: Prof. Dr. Fl. Sudiran
Kode Mata Kuliah / SKS	: / 3 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: Tidak Ada
Kelompok Mata Kuliah	: Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)

B. Deskripsi Mata Kuliah

Mata kuliah hubungan pusat dan daerah menekankan ranah kajian pada pola hubungan yang saling terkait antara pemerintah pusat sebagai sentral kekuasaan pemerintahan dalam skala nasional dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan dalam skala lokal. Yang menjadi penekanan kajian adalah pola hubungan yang tercipta akibat kewenangan yang dimiliki oleh pusat dan daerah serta polemik yang muncul dari hubungan keduanya. Berikutnya kajian yang terkait dengan pola hubungan adalah kajian sistem penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah, karena inilah yang menjadi landasan terbentuknya pola hubungan pusat dan daerah. Dengan demikian mata kuliah ini selalu mengikuti perkembangan terkini dan realitas mutakhir terkait dengan sistem dan tatanan pemerintahan daerah serta pola hubungan yang terbentuk antara pusat dan daerah termasuk pencermatan terhadap proses revisi terbatas UU No 32 Tahun 2004.

C. Tujuan Pembelajaran Umum

1. Pembelajaran pola hubungan yang telah tersistem antara pusat dan daerah
2. Pembelajaran terhadap karakter dan pola hubungan terkait dengan momentum yang melatarbelakangi
3. Mengulas dinamika yang terjadi terhadap tiap perombakan pola hubungan pusat dan daerah.

D. Tujuan Pembelajaran Khusus

1. Pembelajaran terhadap sejarah tata pemerintahan dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. Pembelajaran sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Pembelajaran model-model pembagian kewenangan/urusan dan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
4. Pembelajaran pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
5. Pembelajaran model-model akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

E. Outcome Pembelajaran

1. Memahami sejarah tata pemerintahan dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. Memahami sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Memahami model-model pembagian kewenangan/urusan dan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
4. Memahami pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
5. Memahami model-model akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

F. Materi

RENCANA JADUAL KEGIATAN PEMBELAJARAN MINGGUAN

Minggu	Topik Bahasan	Metode Pembelajaran
I	Introduksi Materi & Kontrak Belajar <ul style="list-style-type: none">• Metode perkuliahan• Scope bahasan hubungan pusat daerah	<ul style="list-style-type: none">• Sharing
II	Legal basis hubungan pusat dan daerah I <ul style="list-style-type: none">• Struktur kelembagaan pemerintah pusat• Kewenangan pemerintah pusat• Pola distribusi kewenangan dalam pemerintah Pusat	<ul style="list-style-type: none">• Ceramah• Tanya Jawab• Diskusi
III	Legal basis hubungan pusat dan daerah II <ul style="list-style-type: none">• Kewenangan propinsi• Kewenangan kabupaten /kota	<ul style="list-style-type: none">• Ceramah• Tanya Jawab• Diskusi
IV	Anatomi hubungan pusat dan daerah <ul style="list-style-type: none">• Koordinasi pemerintahan• Kerjasama antar pemerintahan daerah• Pengawasan (pusat-daerah)	<ul style="list-style-type: none">• Ceramah• Tanya Jawab• Diskusi
V	Fungsi-fungsi kelembagaan daerah <ul style="list-style-type: none">• Peran kepala daerah sebagai pelaksana dan subjek penghubung daerah dengan pemerintahan pusat• Hubungan kerja pemerintah daerah dengan DPRD• Hubungan kerja pemerintah daerah dengan lembaga lain pada tingkat lokal	<ul style="list-style-type: none">• Ceramah• Tanya Jawab• Diskusi
VI	Kawasan khusus dan badan otorita <ul style="list-style-type: none">• KAPET (kawasan pengembangan ekonomi terpadu)	<ul style="list-style-type: none">• Ceramah• Tanya Jawab• Diskusi
VII	Polemik Pemekaran Daerah <ul style="list-style-type: none">• Persyaratan pemekaran daerah	<ul style="list-style-type: none">• Ceramah• Tanya Jawab

	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pemekaran daerah • Polemik pemekaran daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi
VIII	UTS (Middle Test)	UJIAN TULIS
IX	Perimbangan keuangan pusat & daerah I <ul style="list-style-type: none"> • Provisi sektor - sektor strategis • Provisi pengelolaan SDA 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya Jawab • Diskusi
X	Perimbangan keuangan pusat & daerah II <ul style="list-style-type: none"> • Bagi hasil DAU/DAK • <i>Block grant</i>/dana dekonsentrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya Jawab • Diskusi
XI	Otonomi khusus NAD UU No 11 tahun 2006 <ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik otsus Aceh • Perkembangan kontemporer otsus Aceh • Polemik otsus Aceh 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya Jawab • Diskusi
XII	Otonomi Khusus Papua <ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik otsus Papua • Perkembangan kontemporer Otsus Papua • Polemik otsus Aceh 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya Jawab • Diskusi
XIII	Keistimewaan Jogjakarta <ul style="list-style-type: none"> • Akar historis daerah istimewa • Status daerah istimewa dalam NKRI dan implementasi Otoda 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya Jawab • Diskusi
XIV	Daerah Khusus Ibukota Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya Jawab • Diskusi
XV	Kecamatan, kelurahan, dan desa <ul style="list-style-type: none"> • Legal Basis Kecamatan • Legal Basis Kelurahan • Legal Basis Desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah • Tanya Jawab • Diskusi
XVI	UAS (Final Test)	UJIAN TULIS

G. Deskripsi Model Penugasan

Penugasan dibagi dalam dua model yakni tugas terstruktur yang bersifat wajib dan tugas non terstruktur yang bersifat tidak wajib, keduanya memiliki kredit poin penilaian untuk memacu kesadaran mahasiswa lebih aktif dan kreatif dalam mengumpulkan kredit poin dalam setiap penugasan pada perkuliahan selama satu semester.

H. Deskripsi Model Evaluasi

- a. Presensi
- b. Tugas terstruktur
- c. Ujian Tengah Semester
- d. Ujian Akhir Semester

J. Referensi

Buku

1. Abdul Gaffar Karim dkk (ed), 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
2. M. Mas'ud Said, 2005, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Malang, UMM Press
3. R. Siti Zuhro (ed), 2006, *Menata Kewenangan Pusat dan Daerah yang Aplikatif Demokratis*, Jakarta, LIPI
4. _____, 2000, *Otonomi atau Federalisme Dampaknya Terhadap Perekonomian*, Jakarta, Suara Pembaruan
5. Ni'matul Huda, 2005, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar
6. Syaukani HR, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar
7. Herujadi Purwoko dkk (ed), 2004, *Desentralisasi Dalam Perspektif Lokal*, Jogjakarta, Pustaka Percik
8. Nick T Wiratmoko dkk (ed), 2004, *Yang Pusat dan Yang Lokal*, Jogjakarta, Pustaka Percik & Pustaka Pelajar
9. Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Jogjakarta, Penerbit Andi
10. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, 2003, Jakarta, Tim LIPI
11. Irawan Sudjito, 1990, *Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta
12. A. Wijaya, 1998, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta
13. M. Ryaas Rasyid, 1998, *Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru (Kajian Awal)*, Jakarta, Yarsif Watampone
14. M. Ryaas Rasyid, 1996, *Makna Pemerintahan*, Jakarta, Yarsif Watampone
15. Tjahya Supriatna, 1993, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, Jakarta, Bumi Aksara
16. Suyanto, 1996, *Perspektif Otonomi Daerah*, Jakarta, Rineka Cipta
17. Syahda Guruh L.S, 2000, *Menimbang Daerah Vs Federal*, Bandung, Remaja Rosda Karya
18. Howard Elcock, 1982, *Local Government*, London, Methuen & Co.Ltd
19. Bayu Surianingrat, 1991, *Sistem Pemerintahan Daerah*, Jakarta Bina Aksara
20. Alan Norton, 1994, *International Handbook of Local and Regional Government*, England, Edward Elgar Publishing Company
21. Howard Elcock, 1982, *Local Government*, London, Methuen & Co.Ltd

Lain-lain

Surat Kabar, Peraturan Perundang-Undangan, Data Internet dll.